

**“APBN MENJELANG TAHUN POLITIK”**  
SEKNAS FITRA<sup>1</sup>

Menjelang tahun 2018 APBN menunjukkan wajah yang sedikit masam, berkaca dari 2017 pemerintahan Jokowi-JK harus lebih berhati-hati dalam mengimplementasikan APBN 2018 terutama memasuki tahun politik. Berikut adalah beberapa catatan FITRA atas pemerintahan Jokowi-JK pada tahun 2017:

1. Melesetnya Target Pajak

Sejak Jokowi (2015) menjabat sejak tahun 2015, realisasi pajak selalu kurang dari 90%. Hal ini diakibatkan oleh ketergantungan yang tinggi terhadap sektor migas, lesunya daya beli masyarakat terhadap produk domestik, dan tata kelola pajak yang kurang optimal – seperti kebocoran di sektor penerimaan akibat pengawasan yang tidak optimal dan banyak wajib pajak yang belum tersentuh. Berdasarkan kajian FITRA yang didapatkan dari penerimaan pajak tahun lalu, realisasi pajak di akhir tahun 2017 hanya akan mencapai 86,5%

Ket.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Target	878,7	1.016,20	1.139,3	1.072	1.294,2	1.355	1.472,7
Realisasi (Triliun)	872,6	980,1	1.099,9	981,9	1.055	1.105	-
% Realisasi	99,3%	96,4%	96,5%	91,6%	81,5%	81,5%	-

Sumber: DJPK diolah oleh FITRA (Des 2017)

2. Menguapnya Anggaran Negara Akibat Bunga Utang

Kenaikan beban fiskal negara untuk meningkatkan pelayanan program-program pemerintah dan kecilnya pendapatan negara berimplikasi pada semakin membengkaknya hutang negara. Tahun 2016 utang negara Rp. 3.515,46 T, dan meningkat tajam tahun 2017 mencapai Rp. 3.866,45 Triliun. Di tahun 2018 beban negara untuk membayar hutang lebih besar, hutang jatuh tempo Indonesia di tahun 2018 tiga kali lipat dari tahun 2017 yakni 354,36 Juta USD, bunga yang cukup tinggi ini diakibatkan oleh kurang cermatnya pemerintah memilih kreditur. Hal ini terlihat dari tingginya bunga hutang Indonesia, bahkan lebih besar daripada negara tetangga kita seperti Thailand dan Malaysia. Pada APBN 2018 pembiayaan anggaran untuk hutang mencapai Rp 399 triliun atau bertambah Rp 14 triliun dari tahun 2017.

<sup>1</sup>Disusun oleh tim penulis Seknas Fitra

**PEMBAYARAN BUNGA UTANG, TAHUN 2016 - 2017**  
(miliar rupiah)

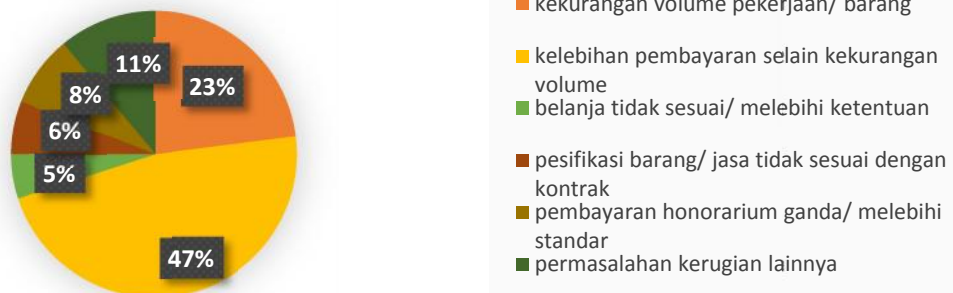
Uraian	2016			2017			
	APBNP	LKFP	% thd APBNP	APBN	RAPBNP	Perubahan	
						Nominal	%
1. Dalam Negeri	174.016,3	167.752,9	96,4	205.479,4	202.878,2	(2.601,2)	(1,3)
2. Luar Negeri	17.202,0	15.008,4	87,2	15.715,2	16.318,1	602,9	3,8
<b>Pembayaran Bunga Utang</b>	<b>191.218,3</b>	<b>182.761,3</b>	<b>95,6</b>	<b>221.194,6</b>	<b>219.196,3</b>	<b>(1.998,3)</b>	<b>(0,9)</b>

Sumber Data: Kemenkeu Diolah Oleh Seknas Fitra

3. Negara Rugi Rp 613 Miliar Akibat 78 K/L

BPK RI merilis LKKL dan LKBUN (Laporan Keuangan Kementerian-Lembaga dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara) tahun anggaran 2016. Berdasarkan data ditemukan ketidakpatuhan atas ketentuan perundang-undangan sebanyak 1.137 masalah dengan total senilai Rp. 3.411 miliar. Penyebab terbesar kerugian adalah dikarenakan “Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan/Barang” dengan nilai sebesar Rp 285 miliar atau 47% dari total kerugian dan “Kekurangan Volume Pekerjaan/ Barang” sebesar Rp 142 miliar atau 23% dari total kerugian. Selain itu, ada potensi kerugian negara. Penyebab terbesar potensi kerugian adalah “Piutang atau Pinjaman Berpotensi Tidak Tertagih” angkanya Rp 1.1744 miliar.

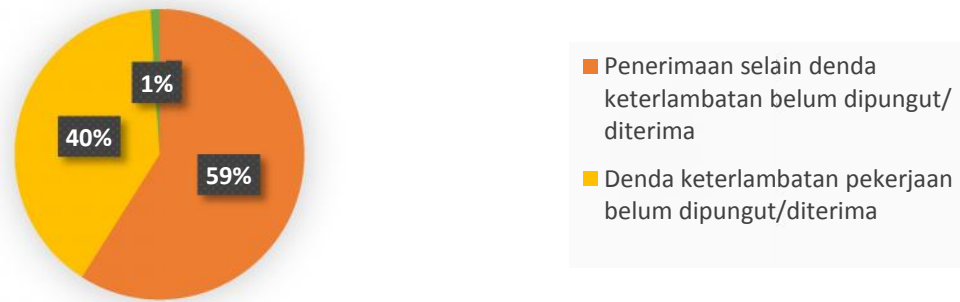
Komposisi Permasalahan yang Mengakibatkan Kerugian Negara



Komposisi Permasalahan yang Mengakibatkan Potensi Kerugian Negara



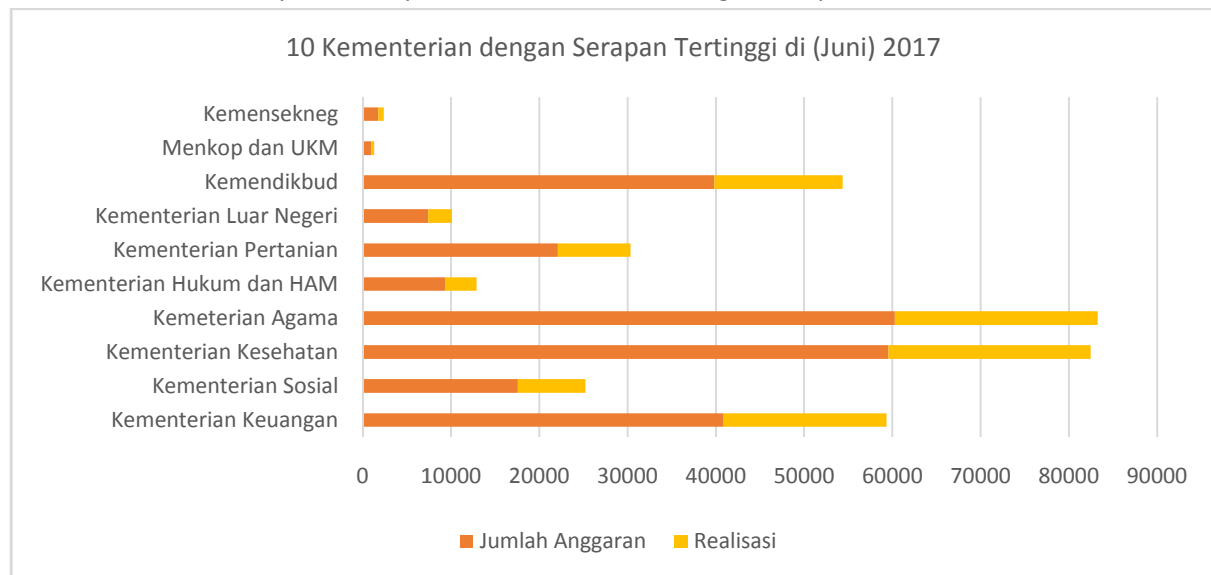
Komposisi Permasalahan yang Mengakibatkan Kekurangan Penerimaan

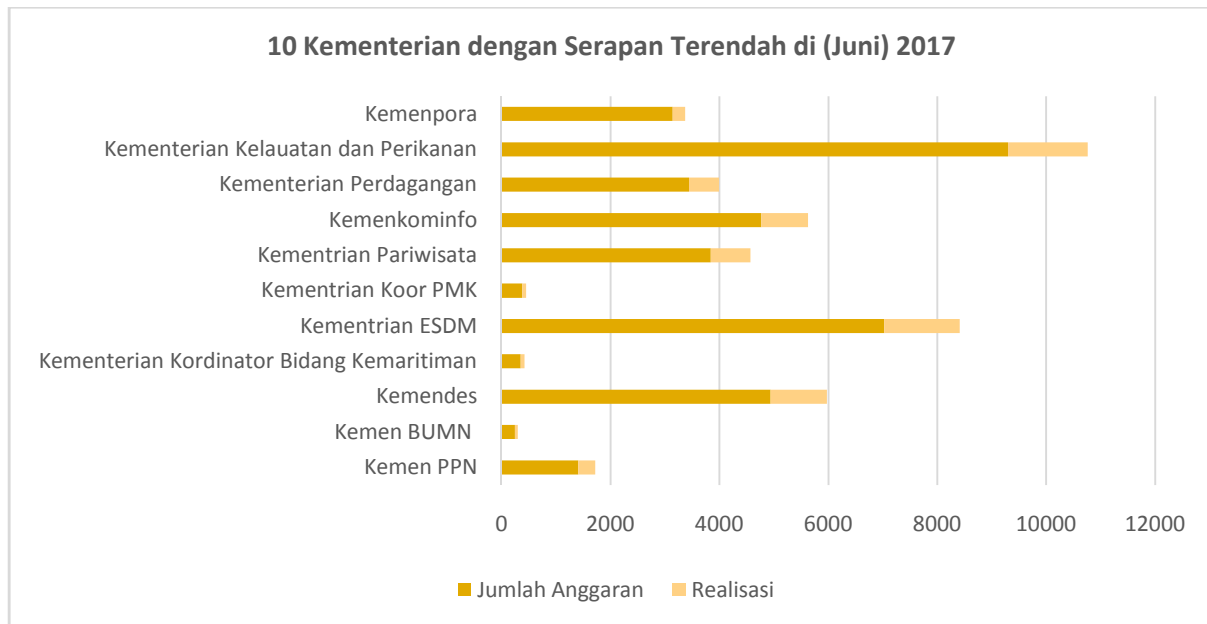


4. Kinerja Anggaran Kementerian Masih Rendah

Seknas FITRA melakukan pemeringkatan terhadap 34 kementerian dan koordinator kementerian yang memiliki kinerja anggaran tertinggi dan terendah berdasarkan serapan anggaran. Berdasarkan data di atas 10 kementerian terbaik, Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pertanian, Kementerian Luar Negeri, Kemendikbud, Menkop dan UKM, dan Kemensekneg merupakan 10 kementerian dengan serapan anggaran/kinerja anggaran terbaik. Sedangkan yang 10 yang terburuk, Kemen PPN, Kemen BUMN, Kemendes, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Kementerian ESDM, Kementerian Koordinator PMK, Kementerian Pariwisata, Kemenkominfo, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kemenpora merupakan 10 kementerian dengan serapan terendah.

10 Kementerian dengan Serapan Tertinggi di (Juni) 2017





#### 5. Wajah Anggaran Pendidikan

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi, sayangnya alokasi anggaran untuk pendidikan belum sepenuhnya sesuai dengan amanat konstitusi, karena alokasi anggaran tersebut lebih banyak dipakai untuk belanja pegawai. Dari riset FITRA di 30 Kabupaten/Kota rata-rata daerah menganggarkan 47% untuk belanja pegawai. Di balik idealnya, proporsi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung 70% : 30%. Dampak dari kecilnya proporsi Belanja Langsung urusan pendidikan ini menyebabkan daerah kehilangan kemampuan dan keleluasaan daerah dalam merancang program (Seperti Infrastruktur, sarana prasarana, sistem pendidikan, kualitas tenaga pengajar, dan lainnya) kegiatan yang secara langsung ditujukan untuk menyelesaikan persoalan pendidikan.

#### 6. Wajah Anggaran Kesehatan

Tren alokasi APBN urusan kesehatan mengalami kenaikan sejak tahun 2015. Pada 2015 anggaran kesehatan daerah mencapai 10%, 2016 mengalami kenaikan di angka 13% dan pada 2017 kembali meningkat yakni sejumlah 15%. Sayangnya contoh kasus anggaran daerah kematian bayi baru lahir di Kab. Sumba Barat tergolong cukup tinggi. Pada tahun 2016 tercatat 35 kasus kematian bayi dan hingga Agustus 2017 telah tercatat 27 kasus kematian bayi baru lahir. Penyebab kematian ini sebagian besar akibat asfiksia, BBLR, Sepsis dan Malaria.

#### 7. Proyek Strategis Nasional Tahun 2017

Pemerintahan Jokowi-JK memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, baik infrastruktur ekonomi dan sosial. Sejak tahun 2015 sampai sekarang, pemerintah telah berkerja dengan cukup baik dalam menyelesaikan beberapa proyek infrastruktur. Total anggaran infrastruktur pada pemerintahan Jokowi-JK baik infrastruktur ekonomi dan sosial berjumlah 400,9 triliun. Pada 2017, Anggaran infrastruktur

sebesar 390,03 triliun, sedangkan untuk anggaran infrastruktur sosial sebesar 5,8 triliun. Berikut adalah sisi lain pembangunan infrastruktur:

- Defisit anggaran telah mencapai 2,92% terhadap PDB. Ini sudah melampaui target perencanaan defisit anggaran yang hanya 2,41%. Peningkatan tersebut dimanfaatkan untuk membiayai belanja produktif dalam infrastruktur.
- Pembiayaan untuk infrastruktur tidak dapat dipenuhi jika mengandalkan pada APBN. Pemerintah mengandeng pihak swasta, BUMN, dan lainnya.
- Namun, pembangunan infrastruktur tersebut belum berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi.
- Sumber BPS menunjukkan tahun 2015, 2016 dan 2017 jumlah tenaga kerja berturut-turut 114,8 juta, 120,8 juta dan 128,06%. Sedangkan presentase pengangguran 7,6% dan 7% dari total jumlah tenaga kerja. Pada tahun 2017 telah terjadi kenaikan tingkat pengangguran sebesar 10.000 menjadi 7,04 juta.
- Pelibatan investasi dalam pembangunan infrastruktur masih menyisakan dampak negatif. Misalnya, Data Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi per 2016 menunjukkan terdapat 21.271 tenaga kerja asal China.
- Potensi penerimaan negara belum dimaksimalkan. Data dari Dirjen Pajak misalnya menulis bahwa dari 36 juta WP, hanya 60% yang patuh.
- Pembangunan infrastruktur masih mengorbankan masyarakat. Misalnya pengusuran di Kulon Progo, pembangunan jalan lintas selatan, jalan tol trans Jawa, reklamasi pesisir utara Jawa Tengah, pembangunan bandara internasional di Purbalingga, dan sebagainya.

#### 8. APBD Masih Sebatas Ritual dan Lahan Korupsi: Studi Kasus Jawa Timur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) studi kasus Jawa Timur belum berbanding lurus dengan pengurangan kemiskinan dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah. Rendahnya Pendapatan Asli Daerah dan Korupsi menjadi penyebab utama dari kemiskinan dan rendahnya (IPM) di Jawa Timur. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di 38 Kab/Kota di Jawa Timur, masih rendah sebagian besar hanya 10-20% menyumbang penerimaan daerah. Hal ini membuat tingkat ketergantungan daerah di Jatim dengan pemerintah pusat cukup tinggi. Selain itu, rendahnya PAD juga mengindikasikan pemda belum mampu memaksimalkan potensi daerah untuk dikelola menjadi sumber pendapatan. Di samping itu, praktik korupsi juga masih menjadi persoalan dalam mewujudkan tata kelola anggaran daerah yang akuntabel. Sepanjang tahun 2017, merupakan mimpi buruk di Jawa Timur terkait dengan pemberantasan korupsi. Berdasarkan catatan FITRA, setidaknya ada sekitar 4 kepala daerah yang tersandung dugaan kasus korupsi yang saat ini ditangani oleh KPK, yang juga melibatkan beberapa pejabat baik di lingkungan pemprov Jatim serta pejabat di Kab/Kota.

Pelaku	Dugaan Kasus
Bupati Pamekasan	Suap untuk penghentian penanganan kasus korupsi penyelewengan dana desa
Walikota Batu	Suap Proyek belanja modal dan pengadaan meubeleur Tahun Anggaran 2017
Bupati Nganjuk	Suap Perekrutan Aparatura Sipil Negara
Walikota Mojokerto	Suap Pembahasan Perubahan APBD
Pejabat Pemprov dan DPRD Jawa Timur	Suap pembahasan Perda

*Sumber : di Olah dari berbagai sumber<sup>23</sup>*

### 9. Implementasi Dana Desa

Sejak dari tahun 2015, 2016, dan 2017, Alokasi Dana Desa (DD) mengalami Peningkatan. Peningkatan DD tersebut juga diikuti dengan peningkatan alokasi dana lain seperti ADD, dan PDRD. Penggunaan dana desa sejauh ini juga telah memberikan kontribusi positif terhadap desa, mulai dari peningkatan sarana dan prasarana, meningkatnya kualitas hidup masyarakat, dan bertambahnya jumlah kemandirian desa.

Tetapi, dalam penggunaannya masih menyisakan banyak masalah seperti, korupsi dana desa, kualitas SDM, peraturan yang tumpang tindih, pengawasan yang belum optimal, dan penyaluran dan realisasi dana desa yang terus menurun setiap tahunnya.

Pemerintah baik Kemendagri, Kemendes PDDT, dan Kemenkeu harus segera berkoordinasi untuk mengatasi kendala tersebut. Sehingga, Alokasi DD tahun 2018 lebih baik dan tepat sasaran.

#### **Rekomendasi:**

1. Adanya regulasi yang konsisten dengan tujuan Pembangunan Nasional
2. Perlu meningkatkan pengawasan publik terkait dengan program dan kebijakan di Sektor Pendidikan dan Kesehatan.
3. Pengawasan langsung dari Masyarakat dalam mewujudkan tata kelola anggaran pelayanan dasar yang 'pro poor dan inklusif', Masyarakatlah yang sebenarnya lebih efektif dalam mengawasi kinerja/capaian target pembangunan nasional. Karena Pendidikan dan Kesehatan menjadi bagian yang mendasar dan amat utama.

\*dalam Triliun Rp

No	Ket.	2017	2018
<b>1</b>	<b>Pendapatan Negara</b>	<b>1.750</b>	<b>1.895</b>
a	Penerimaan pajak	1.499	1.618
b	PNBP	250	275
c	Hibah	1,4	1,2
<b>2</b>	<b>Belanja Negara</b>	<b>2.081</b>	<b>2.221</b>
a	BP Pusat	1.316	1.455
	Belanja K/L	764	847
	Belanja Non K/L	552	607
b	Transfer Daerah & DD	765	766
	Transfer Daerah	705	706
	Dana Desa	60	60
<b>3</b>	<b>Pembiayaan Anggaran</b>	<b>330</b>	<b>326</b>